Bulan :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	5

Tanggal :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SUBBAGIAN HUMAS
Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Dalam Paripurna, Dewan Pertanyakan Kasus RSSW

LAPORAN hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) menjadi salah satu perhatian dalam rapat paripurna untuk pemaparan pandangan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawabawan LPj Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terkait APBD DKI 2014.

Adalah Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, yang bakal menyoroti kebijakan Ahok, dalam pembelian lahan yang belakangan diduga bermasalah itu.

"Kami dari Fraksi Gerindra menyampaikan tidak elok apabila penyampaian pandangan umum tentang pidato Pak Gubernur terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014 sebelum tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK dilaksanakan," terang Moh Arief dari Fraksi Gerindra saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI, kemarin (15/9).

Dijelaskannya juga, seperti merujuk pada pembelian tanah RSSW yang disebut BPK kalau NJOP-nya terlalu mahal sehingga merugikan negara Rp 191,334 miliar. Pernyataan ini berbeda dengan draft pandangan fraksi yang disediakan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Tapi menurutnya juga, dalam draft pandangan fraksi partai berlambang burung garuda itu ada beberapa hal yang dikritisi dari Pemprov DKI. Yakni soal realisasi pendapatan daerah yang hanya Rp 43,82 triliun dari target sebesar Rp 65,04 triliun. Selain itu penggunaan anggaran corporate social responsibility (CSR) yang dikelola Pemprov DKI dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Persoalan pembelian tanah RSSW ini menjadi salah satu poin kritikan dan meminta Pemprov DKI menjelaskan secara rinci dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut. Karena itu, Gerindra meminta Ahok beserta jajarannya mematuhi hasil kerja pemeriksaan BPK terhadap audit APBD DKI 2014.

Alasannya lembaga auditor negara itu bekerja sesuai metode dan mekanisme yang diatur dan dijamin undang-undang. "Gubernur dan aparatur dengan bersumber APBD hendaknya melaksanakan tanggung jawab secara optimal dengan prinsip kehati-hatiaan," tambahnya juga.

Sebagian besar fraksi-fraksi di DPRD DKI juga menyoroti tentang serapan anggaran APBD DKI 2015 yang masih rendah dan rotasi jabatan para pejabat Pemprov DKI yang dinilai cepat. Sementara itu, Fraksi Hanura sendiri menekankan pada realisasi belanja pegawai yang tinggi namun tidak diiringi penerimaan daerah dan penyerapan anggaran yang tinggi.

"Dalam realisasi anggaran, Fraksi Hanura melihat adanya ketidakseimbangan dalam realisasi belanja daerah. Misalnya belanja pegawai yang mencapai Rp 12,6 triliun padahal penyerapan anggaran rendah," kata Syarifuddin dari Fraksi Hanura DPRD DKI saat membacakan pandangan fraksinya dalam LPj Gubernur DKI.

Sementara itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok direncanakan akan memberikan jawaban terkait pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI terkait LPj APBD DKI 2014, pada hari ini atau Rabu (16/9). **(wok)**

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	(9)	10	11	12

2	0	1	5

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SUBBAGIAN HUMAS

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
(Indo Pos)	Pos Kota	Warta Kota	

PURWOKO/INDOPOS

SOROTI KEBIJAKAN: Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berbicara saat paripurna DPRD DKI, kemarin (15/9).